

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan prinsip pokok di atas dan salah satu yang penting adalah bahwa dalam negara hukum, semua orang sama dihadapan hukum tanpa perbedaan yang didasarkan pada ras, agama, kedudukan sosial dan kekayaan.² Dengan demikian, untuk mengatur hubungan antar warga negaranya agar tidak terjadi bentrok antar kepentingan, maka diperlukan suatu aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, tingkat permasalahan sosial dan kriminalitas semakin meningkat dan seakan-akan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Meningkatnya angka kriminalitas tersebut, didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya membuat pertumbuhan angka kejahatan semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menekan angka kriminalitas dalam upaya

¹ Muchammad Ikhsan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Buku Panduan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.1.

² Mochtar Kusumaatmadja & Arif Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hal. 135.

menciptakan ketertiban dan keamanan, hukum dituntut lebih fleksibel dalam arti hukum berubah dan mengikuti perkembangan zaman.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.³ Banyaknya kasus-kasus tindak pidana terjadi saat ini, yang dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu. Beberapa teori yang mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kejahatan, misalnya teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori ekonomi dan teori *differential association*.⁴ Dalam negara modern hampir tiap perbuatan yang dicap sebagai kejahatan oleh sebagian besar penduduknya dirasakan sebagai pelanggaran kesusilaan, walaupun penilaiannya tidak seluruhnya sama. Terlepas dari perbedaan tersebut, terdapat perbedaan besar dalam memberikan penilaian tentang perbuatan yang dilarang, dari yang ringan seperti perburuan hewan sampai yang paling berat seperti pembunuhan biasa atau pembunuhan yang direncanakan.

Negara Indonesia sebagai pilar negara hukum, ternyata tidak serta-merta memberikan perlindungan dan jaminan akan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Menurut pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, bahwa bangsa Indonesia sejak lama dan sampai kinipun selalu mengaku sebagai negara hukum dan

³ M. Sudradjat Bassar, 1985, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, hal. 2

⁴ I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal.

supremasi hukum, tetapi penegakan hukum yang berlangsung selama ini sungguh-sungguh mengecewakan.⁵ Masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang dijumpai dalam kaitanya dengan masalah perlindungan dan jaminan kepastian hukum, dimana masih banyak hak-hak masyarakat yang terpasung dan salah satunya Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang hukum yang meliputi penertiban badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dan meningkatkan kinerja serta kewibawaan aparat penegak hukum demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

Permasalahan Hak Asasi Manusia merupakan permasalahan dan bahan perbincangan yang sangat menonjol dalam dekade saat ini. Oleh karena itu, permasalahan Hak Asasi Manusia memerlukan perhatian yang sangat sungguh-sungguh, karena berpengaruh sangat besar baik dalam kehidupan nasional maupun internasional. Semakin meningkatnya perkembangan zaman di era global yang menunjukkan kemajuan teknologi dan transportasi, membuat setiap negara dituntut untuk mengkaji masalah tersebut secara intensif.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2002, Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif, dikutip oleh Natangsa Surbakti, 2004, *Dari Penegakan Hukum Konvensional ke Penegakan Hukum Progresif*, Surakarta : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 159.

Perlu kita pahami, bahwa dalam proses peradilan pidana salah satu alat bukti yang sah adalah saksi.⁶ Sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷ Hal ini menunjukkan, bahwa keberadaan saksi memegang peranan penting, khususnya dalam banyak kesempatan untuk menentukan hasil akhir dari berbagai kasus baik pidana maupun perdata.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang dimunculkan dalam persidangan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut”.⁸ Dari Pasal 183 KUHAP di atas sudah jelas, bahwa saksi merupakan salah satu kunci pokok dalam proses persidangan terutama sebagai dasar hakim dalam memutus suatu perkara dan dalam menentukan hasil akhir pada suatu perkara.

⁶ Pengertian menurut Pasal 1 angka 1 UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

⁷ Pasal 184 KUHAP yang berbunyi bahwa alat bukti yang sah adalah 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa.

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnaya Paramitha, hal. 133.

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Banyak sekali berbagai tindak pidana yang terungkap saat ini, dimana sebagian besar tidak lepas peran serta masyarakat dalam memberikan laporan tentang adanya pelanggaran hukum dan dalam upaya membantu tugas aparat penegak hukum mengungkap adanya suatu tindak pidana. Misalnya pembunuhan, tindak pidana ini tidak akan terungkap apabila tidak ada peran serta masyarakat dalam hal ini sebagai saksi. Walaupun untuk mengungkap tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain ini merupakan kewajiban aparat penegak hukum, akan tetapi kontribusi masyarakat sangatlah penting terutama sebagai orang yang melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana tersebut.

Perhatian terhadap saksi sampai saat ini masih jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini menjadi persoalan utama, karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi, bahkan sering kita jumpai banyaknya fakta dimana saksi yang akhirnya menjadi tersangka ataupun menjadi terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik oleh pihak-pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan jaminan keamanan yang jauh dari apa yang diharapkan, membuat seseorang tidak bersedia menjadi saksi dan pada akhirnya menghambat proses peradilan pidana.⁹

Muncul suatu dilema bagi saksi saat ini, di satu sisi harus memenuhi kewajibannya namun di sisi lain haknya tidak terpenuhi dan bahkan malah

⁹ Sabto Budoyo, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Semarang: Tesis Program Magister Universitas Diponegoro, hal. 7

dirugikan oleh kepentingan pada pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang. Dengan keadaan yang demikian, tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian tentang adanya suatu tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan yang secara nyata dapat dirasakan seorang saksi, ditunjukkan agar orang tidak merasa takut untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan tersebut proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana yaitu, untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PADA KASUS PEMBUNUHAN”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dengan maksud agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan, serta tidak salah sasaran serta mampu memberikan deskripsi tentang masalah yang akan penulis teliti, maka penulis perlu memberikan

¹⁰ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9

pembatasan. Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi masalah perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan (studi kasus di Polres Surakarta).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi pokok kajian pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan dan hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian apalagi penelitian ilmiah selalu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana;

- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan dan hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang latar belakang perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana, bentuk perlindungan dan hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak, khususnya para penegak hukum dalam kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, dalam tindakanya harus didasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan yang memang diciptakan untuk mengatur suatu tatanan di dalam pemerintah, serta termasuk untuk melindungi setiap hak warga negara dari tindakan para penguasa yang semena-mena.¹¹ Konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, karena konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam konsep negara hukum yang selalu dikaitkan dengan ide dasar keseimbangan yang menyatakan bahwa pembangunan sistem pidana nasional adalah merupakan bagian pembangunan sistem hukum nasional. Sebagai salah satu asas pembangunan nasional dan ditentukan asas hukum yaitu bahwa dalam membangun negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan.¹² Ciri-ciri dari ide sentral *rechtstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang bertumpu pada asas kebebasan

¹¹ Ayunning Tyas Nilasari, 2011, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dapat Diterimanya Conservatoir Beslag Sebagai Pelaksanaan Eksekusi Riil atas Sengketa Tanah (Study Kasus di Pengadilan Negeri Magetan)*, Surakarta: Jurnal Hukum Justissica Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹² Soehardjo Sastro Soehardjo, 1993, Upaya pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahanya, pada CSIS. Hal 31, Dalam buku Murofiqudin, 1998, *Penegakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 8.

dan persamaan.¹³ Oleh karena itu, implementasi dari ide dasar keseimbangan yang berkaitan dengan saksi diwujudkan dengan perlindungan masyarakat, korban, dan pelaku yang tidak terlepas dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Terlebih dalam proses peradilan pidana, dimana seorang saksi memiliki posisi kunci untuk menemukan titik terang suatu tindak pidana.

Kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹⁴ Misalnya kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atau disebut juga tindak pidana pembunuhan. Di dalam KUHP tindak pidana pembunuhan diatur pada buku II Titel XIX (Pasal 338-350) tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”. Pembunuhan ini termasuk tindak pidana materiil (*materiil delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat.¹⁵

Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana pembunuhan termasuk delik biasa. Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana ini penanganannya merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengungkap apakah benar telah terjadi tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana terdapat mekanisme kerja sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan. Proses peradilan pidana

¹³ Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hal. 74

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, dalam buku Murofiquidin, 1998, *Penegakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2

¹⁵ M. Sadrajat Bassar, 1985, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya.

adalah mekanisme pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kejahatan.¹⁶ Dalam proses peradilan pidana, tahap untuk mengungkap adanya tindak pidana meliputi penyelidikan-penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi putusan pengadilan. Proses pertama diawali dengan adanya laporan ke pihak Kepolisian oleh masyarakat baik itu saksi ataupun siapa saja yang melihat terjadinya tindak pidana. Setelah menerima laporan polisi melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yaitu, serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana guna menemukan tersangka.

Dalam proses inilah peran anggota masyarakat sangat penting dengan bersedia menjadi saksi. Akan tetapi, seringkali warga yang diminta untuk menjadi saksi memilih untuk didampingi para kuasa hukum selama proses berlangsung. Karena warga sering mendapatkan ancaman dari pelaku tindak pidana, maka secara tidak langsung dapat menghambat proses penegakan hukum.

Apabila dalam proses penyidikan sudah ditemukan bukti dan pelaku tindak pidana, maka penyidik membuat berita acara penyidikan untuk dilimpahkan ke Jaksa penuntut Umum. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari

¹⁶ Mardjono Reksodipoetro, 1993, Sistem Peradilan Indonesia, Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hal 1, Dalam buku Muchamad Ikhsan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 43

dengan teliti untuk merumuskan surat dakwaan yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan setelah itu jaksa meminta hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Tahap selanjutnya adalah eksekusi berupa pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, apabila salah satu keberatan pada putusan pada tingkat pertama, maka dapat dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Terungkapnya suatu tindak pidana salah satunya tidak terlepas dari peran masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dari laporan itulah, proses peradilan pidana sudah mulai berjalan. Secara umum pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Karena terkait pemeriksaan perkara dalam persidangan, hakim dalam mengambil keputusan memerlukan suatu alat bukti yang salah satunya adalah saksi. Dengan demikian, dalam persidangan saksi harus mendapatkan perlindungan, jangan sampai seorang saksi malah menjadi korban dari suatu persidangan.

Perlindungan terhadap saksi harus diberikan, apabila proses peradilan pidana dapat berjalan dan keadilan dapat ditegakkan. Sesuai dengan adagium "*fiat justitia et pereat mundus*", hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh baik

dalam keadaan normal atau damai, atau pada saat terjadi pelanggaran hukum.¹⁷ Hal ini, karena fakta menunjukan banyaknya kasus-kasus pidana ataupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap karena banyak ancaman terhadap saksi, korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut membuat kesaksian kepada penegak hukum. Namun sayangnya, hal tersebut tidak mendapat perhatian dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian merupakan suatu cara, jalan, petunjuk dan salah satu faktor yang penting dalam suatu penelitian, karena merupakan penunjang dalam suatu proses penelitian, yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi, dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah melalui pendekatan Sosiologis atau Non-Doktrinal dimana fokus kajiannya adalah data primer.¹⁸ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Pada penelitian

¹⁷ Muchamad Ikhsan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 40.

¹⁸ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum.*, Surakarta: *Buku Pegangan Kuliah* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 47.

empiris, yakni menekankan pada sisi berlakunya hukum secara kenyataan di lapangan (*law in concreto*). Penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau masyarakat., yaitu tentang praktik perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan di kota Surakarta oleh aparat penegak hukum.

2. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan, perilaku, gejala yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti praktik perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan, yang merupakan perilaku aparat penegak hukum khususnya Kepolisian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berupa fakta yang ada di lapangan, yakni penelitian terhadap perilaku aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal 7.

saksi pada kasus pembunuhan. Dengan demikian, data dapat diperoleh secara langsung dari aparat Kepolisian Polres Surakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian serta pengolahan data yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal hukum, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berupa keterangan dan informasi dari aparat Kepolisian Polres Surakarta tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan melakukan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, tujuannya untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, berkaitan dengan jenis data tersebut, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, majalah-majalah, beberapa sumber dari situs internet dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Polres Surakarta dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan karya ilmiah ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan objek penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, makalah-makalah, karya-karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Metode wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun atas empat bab, setiap bab berisi uraian yang saling berkaitan, sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini. Tinjauan pustaka ini, dibagi atas beberapa subbab yang terdiri dari subbab A berisi tentang pengertian dari proses peradilan pidana, subbab B berisi tentang tinjauan umum tentang pembuktian, subbab C berisi tentang peranan dan kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, subbab D berisi tentang pengertian perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana, subbab E tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan.

Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang ada, terdiri dari beberapa subbab yaitu subbab A berisi tentang latar belakang lahirnya perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, subbab B berisi tentang perlindungan terhadap saksi, subbab C pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana, subbab D faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi, subbab E kebijakan perlindungan saksi untuk masa yang akan datang.

Terakhir berisi kesimpulan dan saran, dimana pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian skripsi dari bab-bab sebelumnya serta saran sebagai penutup.